

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Arifin, Firdaus. (2019). *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Gunakaya, Widiada. (2017). *HUKUM HAK ASASI MANUSIA*. Yogyakarta: ANDI
- Renggong, Ruslan. Ruslan, & Dyah Aulia Rachma. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkas: Bandung
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Bambang, Joni. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia Riziya, Nanda Dwi & Fardiansyah, Hadi (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Kabupaten Bandung: Widina Media Utama
- Sahir, Syafrida Hafni. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia.
- Fahmi, Chairul. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki)
- Suparman. (2022). *Pembangunan ketenagakerjaan, teori, konsep, model dan studi empiris*. Publica Indonesia Utama: Jakarta
- Yuhelson (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing:Gorontalo
- Ahmad, Suhelmi. (2007). *Pemikiran Politik Barat*. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rinek Cipta
- Moh. Mahfud, MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- Yanto, Oksidelfa. (2020). *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Pustaka Reka Cipta: Bandung
- Afif, Zaid. (2018). *KONSEP NEGARA HUKUM RULE OF LAW DALAM*

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Dalam Kehidupan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia

## **C. JURNAL DAN SUMBER LAIN**

Hadi, Fikri. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia The State of Law and Human Rights in Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*. Vol. 1 No. 2 Supriyanto, Bambang Heri. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3

Pangestika, Elza Qorina. (2018). Pengaturan Hak Menyusui Anak Pada Waktu Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Wacana Hukum* Vol.XXIV No.2

Syahriar, Irman. Bazarah, Jamil & Khairunnisah. (2025). Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia. *JOURNAL OF KNOWLEDGE AND COLLABORATION*

Charda S, Ujang. (2023). Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1

Devi, Chintya. (2021). Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum. *YUSTISIA TIRTAYASA : Volume 1 Nomor 1*

Pangestika, Elza Qorina. (2018) Pengaturan Hak Menyusui Anak Pada Waktu Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Wacana Hukum: Vol.Xxiv, No.2*

Mezak, Meray Hendrik. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review. Fakultas Hukum Universiis Pelita Harupan*, Vol. V, No 3

Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra: Volume 05 No.01*

Ridlwani, Zulkarnain. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan

Nachtwachterstaat. *fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume.5. No. 2

- Kennedy, Alexander. (2024). Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori Dan Realitas Di Indonesia. *Volume 4, Nomor 1*. Doi: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1>
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak warga negara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 188–200
- Purwito, E. (2023). Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluwarsa di Kota Surabaya. *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 1–21. <https://doi.org/10.56493/dekrit.v13n1.152>
- Rianto, A. (2018). Politik hukum negara kesejahteraan Indonesia pasca reformasi. *Oase Pustaka*. 6- 148
- Faisal, A. (2023). Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *International Journal of Cross Knowledge*, ), 3014–328. <https://edujavare.com/index.php/IJCK> 315-328
- Simatupang, Taufik H. Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal HAM*, Volume 12, No 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>
- Sayid, Ansar (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *SOUMATERA LAW REVIEW*. Volume 2, Nomor 2, 2019
- Zainal Arifin Hoesein (2016) *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jatim: Setara Press Kelompok Instrans Publishing.
- Hendra Sudrajat, Beggy Tamara. (2018) .Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang. *Soumatera Law Review* 1(2).
- SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 2 N0.5 Juli-Desember 2018
- Kadaryanto, Bagjo (2012) KONSEP RECHTSSTAAT DALAM NEGARA HUKUMINDONESIA (KAJIAN TERHADAP PENDAPAT M.T. AZHAR. *AL-RISALAH JISH* Vol. 12 No. 2, Desember2012
- Asshidiqie, Jimly (2006) Konstitusi &Konstitusionalisme Indonesia. *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.*,

- Iqbal, Firdaus Muhammad (2022). KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 4 No.2 Desember 20
- Mandasari, Zayanti. (2025). Hak Menyusui Bagi Ibu yang Bekerja. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--hak-menyusui-bagi-ibu-yang-bekerja>
- Akhirah, **Andi**. Pranata, **Arivigo**. (2024). Perusahaan Wajib Ada Ruang Laktasi, Bagi Pekerja Menyusui. <https://bplawyers.co.id/2024/11/11/perusahaan-wajib-ada-ruang-laktasi-bagi-pekerja-menyusui/>
- Valentine, V. L., Eskanugraha, A. P., Sasanti, R. S. B., & Purnawan, I. K. W. A. (2023). Penafsiran keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi: Perspektif teori kepastian hukum. *Jurnal Anti Korupsi*, 13(1), 14–27. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004>
- Situngkir, D. A. (2023). Mengenal teori demokrasi dan teori kewenangan dalam ilmu hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 8–15. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Anshar, Sayid. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *SOU MATERA LAW REVIEW* (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 2, Nomor 2, 2019
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak asasi manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. *Humanika: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id>
- Raharjo, S., Anindita, & Karim, A. (2023). Tinjauan komprehensif hak asasi manusia dalam konteks sistem hukum tata negara. *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra & Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.
- Apaut, Y. C., & Fallo, C. I. (2023). Implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia: Suatu tinjauan filsafat hukum. *Jurnal Sainmikum*, 2(4), 1–12. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1155>
- Zubi, M., Marzuki, & Affan, I. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(3), 1171–1195. <https://doi.org/10.10101/metadata.v3i3>
- Lawendatu, M., Soewikromo, D., & Korah, R. S. M. (2021). Tinjauan hukum ketenagakerjaan tentang perlindungan buruh/pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Lex Et Societatis*, 9(1)

- Alfikro, A. (2023). Analisis keabsahan pengawasan ketenagakerjaan menurut UU No. 13 Tahun 2003 dalam pemenuhan hak pekerja disabilitas dalam tinjauan hak asasi manusia. *Jurnal Gema Keadilan*
- Edbert, M., & Simanjuntak, Y. N. (2024). Pembuatan konten edukasi notaris menggunakan media sosial berdasarkan kode etik notaris dan teori kepastian hukum. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(2) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas>
- Kusnadi, S. P. (2017). *Hakikat dan sejarah perkembangan hak asasi manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka. Diakses dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI431702-M1.pdf>
- Nurmalasari. (2021). Transformasi hukum tentang hak asasi manusia ditinjau dari sejarah. *Semayo: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 8–15. Universitas Suryakencana.
- Salsabila, N. (2025). Optimalisasi aspek pengawasan ketenagakerjaan guna memastikan perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(3), 328–337. <https://journal.appihi.or.id>
- Riyanto, A. (2018, Desember 26). *Penegakan hukum, masalahnya apa?* Business Law BINUS. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>
- Juliano, M., & Sistawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 1–10. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Putra, Marsudi Dedi. “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila.” *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, Vol. 23, No. 2, September 2021.
- Libra, R., & Fauzan, M. (2023). Penerapan konsep *welfare state* dalam memprioritaskan pelayanan di bidang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Riau. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(1).
- Sirait, T. M. (2016). Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi The Urgency of Extending Corporate Criminal Liability as the Manifestation of Constitutional Implementation. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 580)

- Loway, C. A., Frederik, W. A. P. G., & Baftim, F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Masyarakat yang Tinggal di Kawasan Konservasi Indonesia. *Lex Privatum. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*. 13(05), 1–15.
- Moh. Fadli, Public Welfare Atau Social Justice Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia, *Disertasi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran* (2012).
- Imran. (2019) Modal Sosial Hukum untuk Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, *Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*.
- Hijriani, M., Yusuf, M., Siregar, W. A., & Sopian. (2023). Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat. *Jurnal Sultra Research of Law*, 5(2), 58–65.
- Asshiddiqie, J. (2006). Penegakan hukum. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Soerjono Soekanto. (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. *Jakarta : Raja Grafindo Persada*
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 734–740. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>